

<https://maluku.kpu.go.id>



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU 2024

  @kpuprovmaluku |  Kpu Provinsi Maluku |  KPU Provinsi Maluku



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ilham

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syamsul Rifan Kubangun

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, Januari 2024

Pihak Kedua
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku



Syamsul Rifan Kubangun

Pihak Pertama
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku



Ilham

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU**

Nama/Unit Organisasi
Tahun

: Sekretariat KPU Provinsi Maluku
: 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Maluku yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase target kinerja KPU Provinsi Maluku yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	80%
3	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	90%
4	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%
5	Terlaksananya proses seleksi Anggota Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase Anggota Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku yang di seleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
6	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%
7	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
8	Pembentukan Badan Adhock	Jumlah badan adhock yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Satker (Provinsi/Kabupaten/ Kota)
8	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
9	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
10	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
11	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%

12	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap
13	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	87,5%
14	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	75%
15	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	75%
		Persentase hasil rapat pleno yang ditindak lanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
16	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%
17	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang dapat dipenuhi	72%
18	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Maluku dan KPU Kab/Kota Se-Maluku	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%
19	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95%
20	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	75%
21	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%
22	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	2 Orang

23	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
24	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan Jumlah sengketa Hukum yang di ajukan ke Mahkamah Konstitusi	3 Perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	88%
25	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
26	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 (Lima) hari kerja	100%
27	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	12 Satker (Provinsi/Kabupaten/
28	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	60%
29	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	12 Satker (Provinsi/Kabupaten/
30	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	100%
31	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula , Perempuan dan Disabilitas	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih Perempuan	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih Pemula	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Disabilitas	100%
32	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Provinsi Maluku paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
33	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	12 Satker (Provinsi/Kabupaten/ Kota)

		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
34	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Presentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
35	Ketersediaan Logistik Pemilu	Presentase Penyediaan Logistik Pemilu	12 Satker
36	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Presentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan Penetapan Hasil Pemilu	12 Satker
37	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	80%

Program

Anggaran

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1 | Program Dukungan Manajemen | Rp 10.252.187.000 |
| 2 | Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi | Rp 3.652.389.000 |

Ambon, Januari 2024

Pihak Kedua
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku



Svamsul Rifan Kubangun

Pihak Pertama
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku



Ilham

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU**

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Maluku
Tahun : 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Maluku yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase target kinerja KPU Provinsi Maluku yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	80%
3	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	80%

Program

Anggaran

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1 | Program Dukungan Manajemen | |
| 2 | Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi | Rp 798.139.000 |

Ambon, Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku



Ilham

Pihak Pertama
Kepala Bagian Perencanaan, Data
dan Informasi



Moliabansa Latupono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU

Nama/Unit Organisasi
Tahun

: Sekretariat KPU Provinsi Maluku
: 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
2	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
3	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
5	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap
6	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	87,5%
7	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	75%
8	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	75%
		Persentase hasil rapat pleno yang ditindak lanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
9	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%
10	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang dapat dipenuhi	72%
11	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%

		Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Presentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
12	Ketersediaan Logistik Pemilu	Presentase Penyediaan Logistik Pemilu	12 Satker
13	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Presentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan Penetapan Hasil Pemilu	12 Satker

Program

1 Program Dukungan Manajemen

2 Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi

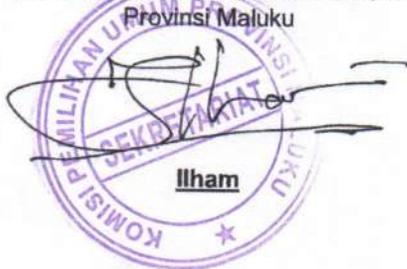
Anggaran

Rp 10.252.187.000

Rp 430.835.000

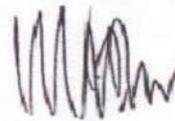
Ambon, Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku



Ilham

Pihak Pertama
Kepala Bagian
Keuangan, Umum dan Logistik



M.Taha.Rahawarin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Maluku
Tahun : 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	90%
2	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%
3	Terlaksananya proses seleksi Anggota Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase Anggota Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku yang di seleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
4	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%
5	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
6	Pembentukan Badan Adhock	Jumlah badan adhock yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota)
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Maluku dan KPU Kab/Kota Se-Maluku	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%
8	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95%
9	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	75%
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%
11	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	2 Orang
12	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
13	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan Jumlah sengketa Hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	3 Perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	88%

14	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
15	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 (Lima) hari kerja	100%
16	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	12 Satker (Provinsi/Kabupaten/
17	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	60%
18	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	12 Satker (Provinsi/Kabupaten/ Kota)
19	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	100%
20	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula , Perempuan dan Disabilitas	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih Perempuan	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih Pemula	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Disabilitas	100%
21	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Provinsi Maluku paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
22	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	12 Satker (Provinsi/Kabupaten/ Kota)

Program

Anggaran

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | Program Dukungan Manajemen | |
| 2 | Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi | Rp 2.169.272.000 |

Ambon, Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku



Ilham



Pihak Pertama
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU**

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Maluku
Tahun : 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Maluku yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase target kinerja KPU Provinsi Maluku yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	80%

Program

Anggaran

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1 | Program Dukungan Manajemen | |
| 2 | Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi | Rp 798.139.000 |

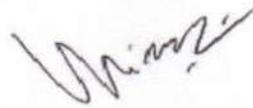
Ambon, Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bagian Perencanaan, Data
dan Informasi



Moliabansa Latupono

Pihak Pertama
Kepala Bagian Perencanaan



Mirawaty Aksan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Maluku
Tahun : 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	80%

Program

Anggaran

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1 | Program Dukungan Manajemen | - |
| 2 | Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi | Rp 254.143.000 |

Ambon, Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi



Moliabansa Latupono

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Data dan Informasi



Vanny.D.Kastanja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU**

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Maluku
Tahun : 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
2	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 (Lima) hari kerja	100%
3	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	12 Satker (Provinsi/Kabupaten/ Kota)
4	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	60%
5	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	12 Satker (Provinsi/Kabupaten/ Kota)
6	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	100%
7	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula , Perempuan dan Disabilitas	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih Perempuan"	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih Pemula"	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Disabilitas"	100%
8	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Provinsi Maluku paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
9	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	12 Satker (Provinsi/Kabupaten/ Kota)

Program

1 Program Dukungan Manajemen

2 Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi

Anggaran

-

Rp 1.885.191.000

Ambon, Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Rachel Gaspersz

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU**

Nama/Unit Organisasi
Tahun

: Sekretariat KPU Provinsi Maluku
: 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	90%
2	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%
3	Terlaksananya proses seleksi Anggota Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase Anggota Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku yang di seleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
4	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%
5	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
6	Pembentukan Badan Adhock	Jumlah badan adhock yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Satker (Provinsi/Kabupaten/ Kota)
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Maluku dan KPU Kab/Kota Se-Maluku	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%
8	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95%
9	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	75%
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%
11	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	2 Orang
12	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
13	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pertanggung	Penurunan Jumlah sengketa Hukum yang di ajukan ke Mahkamah Konstitusi	3 Perkara

13	sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	88%
----	---	--	-----

Program

Anggaran

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1 | Program Dukungan Manajemen | - |
| 2 | Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi | Rp 284.081.000 |

Ambon, Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Hukum
dan SDM



Ahmad Kotabanda

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Maluku
Tahun : 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
2	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
3	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
5	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap

Program

- 1 Program Dukungan Manajemen
- 2 Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi

Anggaran

Rp 5.138.411.000

-

Ambon, Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bagian Keuangan, Umum
dan Logistik



M.Taha.Rahawarin

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Keuangan



Erlita Reny Latuconsina

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU**

Nama/Unit Organisasi
Tahun

: Sekretariat KPU Provinsi Maluku
: 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	87,5%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	75%
3	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	75%
		Persentase hasil rapat pleno yang ditindak lanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
4	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%
5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang dapat dipenuhi	72%
6	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%

		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
7	Ketersediaan Logistik Pemilu	Presentase Penyediaan Logistik Pemilu	12 Satker
8	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Presentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan Penetapan Hasil Pemilu	12 Satker

Program

Anggaran

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | Program Dukungan Manajemen | Rp 5.113.766.000 |
| 2 | Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi | Rp 430.835.000 |

Ambon Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bagian Keuangan, Umum
dan Logistik



M.Taha.Rahawarin

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik



Earlynda Lisapaly